

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pengulangan Kejahatan*, Prenanda Media Grup, Jakarta.

Asshidiqqie, Jimly, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH-UII Press, Cetakan ke- 2, Yogyakarta.

_____, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

_____, 2012 *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Armico Bandung.

Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

F. Strong, C., 1966, *Modern Political Constitution*, Sidwig & Jhon Limited, London.

Hamzah, Andi, 1993, *Hukum Acara Pidana*, Arkhika Media Cipta, Jakarta.

_____, 1995, *Jaksa Di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar

Grafika, Jakarta.

_____, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kejaksaan RI, 1985, *Lima Windu sejarah Kejaksaan Republik Indonesia (1945-1985)*,

Jakarta.

Manan, Bagir, 1987, *Konvensi Ketatanegaraan*, Amrico, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti,

Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti,

Bandung.

Mulyadi dan Puradiredja, Kanaka, 2002, *Sistem Pengendalian Internal untuk Bisnis*,

Salemba Empat, Jakarta.

Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Kerjasama Yayasan Obor dan

Transparansi Internasional Indonesia.

Prakoso, Djoko & Murtika, I Ketut, 1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia*,

PT. Bina Aksara, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1979, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.

_____, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum*

Nasional, CV. Rajawali, Jakarta.

_____, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

_____, 2009, *Pendidikan Hukum dan Pendidikan Manusia*, Genta

Publishing, Yogyakarta.



Rammelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia), PT Gramedia Pustaka, Jakarta

Singgih, 2002, *Dunia Pun Memerangi Korupsi*, Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas

Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang.

_____, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, PT Alumni,

Bandung.

Soetomo, A., 1990, *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek*, Pustaka Kartini,

Jakarta.

Surachman, RM. dan Hamzah, Andi, 1995, *Jaksa di Berbagai Negara (Peranan dan*

Kedudukannya), Sinar Grafika, Jakarta.

Suriasumantri, Jujur S., 1986, *Ilmu Dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik : Sebuah*

dialog tentang keilmuan dewasa ini, Gramedia, Jakarta.

Suseno, Franz Magnis, 2003, *Etika Politik (Pinsip-prinsip moral dasar kenegaran*

modern), PT Gramedia, Cetakan ke-7, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____ dan Sri Mamudji, 2000, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan*

Singkat), Rajawali Pers, Jakarta

Widhayanti, Erni, 1996, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHP*, Liberty,

Yogyakarta.

Zainuddin, Al, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal /Makalah/Artikel Surat Kabar

Aaken, Anne van, Salzberger, Eli dan Voigt, Stefan, “The Prosecution of Public Figures

and the Separation of Powers: Confusion within the Executive Branch”, German

Working Papers in Law and Economics, 2010.



Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Univeristas Bengkulu Volume III Nomor 2, November 2010.

Andriadi, Ahmad, "Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.

Asshiddiqie, Jimly, "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", Makalah, Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006.

Baker, Nancy V., "Conflicting Loyalties: Law and Politics in the Attorney General's Office 1789-1990", Lawrence, University Press of Kansas, Kansas, 1992.

Blau, Peter M. dan Meyer, Marshall W., "Birokrasi dalam Masyarakat Modern, Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa", KHN dan MaPPI, Jakarta, 2004.

Damaskus, C., "Structure of Authority and Comparative Procedure", Yale, 1975.

Effendy, Marwan, "Deskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi", Makalah, Seminar Nasional, Universitas Brawijaya Malang, Malang, 11 Juni 2012.

_____, Selasa, 25 November 2014, "Jaksa Agung Pilihan Siapa?", Indonesia Lawyer Club, Tv One.

Fredico, Giuseppe Di, "Prosecutorial Accountability, Independence, and Effectiveness in Italy", 2008 dalam Buku Promoting Prosecutorial Accountability, Independence and Effectiveness (Comparative Research), 2008, Open Society Institute Sofia, Bulgaria.



Sage Foundation, New York. 1975

Grozev, Yonko, "Report on the Bulgarian Prosecution Service", 2008 dalam Buku Promoting Prosecutorial Accountability, Independence and Effectiveness (Comparitive Research), 2008, Open Society Institute Sofia, Bulgaria.

Hamzah, Andi, "Konsep dan Strategi Pembaharuan Kejaksaan Republik Indonesia", Makalah, Workshop Governance Audit of the Public Prosecutor Servive, Bali, 21-22 Februari 2001.

_____, "Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", Makalah, Seminar Hari Bakti Adiyaksa, Jakarta. 20 Juli 2000.

Hanzel, Milan, "General Prosecutor of Slovak Republic", Makalah, The Prosecutor's Office in a Democratic and Constitutional State, The General Prosecutor's Office and the Slovak National Supporting Committee of Europe 2000, 25-27 April 2003.

Harkrisnowo, Harkristuti, "Kejaksaan Agung dalam Tatanan Kelembagaan: Beberapa Catatan Awal", Makalah, Seminar Hukum dalam Konteks Perubahan ke Dua UUD 1945, MPR dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 24-26 Maret 2000.

Iskandar, Nandan, "Kejaksaan di Mata Masyarakat", Jurnal Bina Adhyaksa, Vol.III, No.1, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Juli 2011.

Isra, Saldi, "Eksistensi Kejaksaan Pasca-Perubahan UUD 1945", Jurnal Adhyaksa Indonesia, Edisi 2, September 2014.

Kesornsiricharoen, Somjai, "The Role and Function of Public Prosecutors in Thailand", Makalah, The 107th International Training Course: The Role and Function of Prosecution in Criminal Justice, UNAFEI, 1997.



Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang. 2001.

Lubet, Steven, "Judicial Discipline and Judicial Independence", Law and Contemporary Problems, Vol. 61, No. 3, 1998.

Magill, M. Elizabeth, "Beyond Powers and Branches in Separation of Powers", University of Pennsylv Law Review 2001, Working Paper No. 01-10.

Majalah Adhyaksa Indonesia, "Posisi Ambigu Kejaksaan RI", Edisi Khusus Bulan Juli 2014, PT Haidar Indo Telenet, Jakarta, 2014.

Mammado, Fikrat F., "Democratisation and Prosecution Process," Makalah, 9th Annual Conference, 2004.

Nasution, Adnan Buyung, "Kembalikan Kejaksaan sebagai Alat Penegakan Hukum", Makalah, Diskusi Panel di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 11-12 Januari 1999.

Palmer, Robert, "The Confrontation of the Legislative and Executive Branches: An Examination of the Constitutional Balance of Power and the Role of the Attorney General", Pepperdine Law Review, Vol. 11, 1984.

Peter J. P TAK, "Task and Powers of The Prosecution services in The EU Member States", Wolf Legal Publishers, Belanda, 2004.

Porter, Lyman W., Hickman, dan Lawler, "Behavior in Organization", Mc, Graw- Hill, Book Company, 2000.

Sahetapy, J.E., Seminar Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia, ,Kejaksaan RI, Jakarta, 27 September 2005.

Sekaran, Umar, "Organization Behavior", Tata M. Graw-Hill Publisihing Company, Limited, New Dehli, 1989.



Yogyakarta, 2013.

Štefan, Beneč, "Independence of Prosecution", Makalah, Seminar The Prosecutor's Office in a Democratic and Constitutional State, The General Prosecutor's Office and the Slovak National Supporting Committee of Europe 2000. 25-27 April 2003

Suhardibroto, "Restrukturisasi Kejaksaan Guna Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum untuk Menjawab Tantangan Zaman", Makalah, Diskusi Panel, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 11-12 Januari 1999

Sunny, Ismail, "Upaya Mewujudkan Demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945", Makalah, Bandar Lampung, 24-26 Maret 2000.

Sutrisno, Anton, "Kemandirian Jaksa sebagai Penuntut Umum (Analisis terhadap Kebijakan Rencana Tuntutan)", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

Varga, András Zs., "Criteria Concerning the Public Prosecution in the Context of the Accession of Hungary to the EU," Makalah, Seminar The Prosecutor's Office in a Democratic and Constitutional State.

Waluyo, Bambang, "Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia", Jurnal Bina Adhyaksa Vol. II., 1 Maret 2011.

Wirthyn, Jack dan Lewis, Peter W., "Modern Criminal Justice", Mic Graw-Hill, New York, 1978.

Annex IX, “The Reform of the Prosecutor's Office,” <www.supremecourt.ge/english/Annex9.pdf - 45k>, Diakses pada 20 November 2014.

Antara News, Kamis, 12 Agustus 2010, “Jabatan Jaksa Agung Diserahkan Presiden”, www.antaraneWS/JabatanJaksaAgungDiserahkanPresiden-ANTARANews.htm/, Diakses pada 20 Februari 2015.

Arief, Basrief, 25 November 2013, *Pidato Sambutan Jaksa Agung Republik Indonesia Pada Penganangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)*, <http://www.kejaksaan.go.id/pidato.php?idu=0&id=153&hal=3>, Diakses pada 27 September 2014.

Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat, Suatu Sumbangan Pemikiran*, <http://jimly.com/pemikiran/makalah?page=15>, Diakses pada 22 Oktober 2014.

_____, November 2013, “Tanya Jawab”, <http://jimly.com/tanyajawab?page=186>, Diakses pada 18 November 2014.

Black Law’s Dictionary, <http://thelawdictionary.org/prosecution/>, Diakses pada 7 Januari 2015.

Bukti Habibie Tak Serious Periksa Soeharto, Wakil Panji Masyarakat di Periksa Polisi diunduh dari <http://iwan-uni.blogspot.com/2005/07/bukti-habibie-tak-serious-periksa.html>. Diakses pada 8 Desember 2014.

Euro Justice, Agustus 2004, “*The Role of the Public Prosecutor in Court*”, http://www.euro-justice.com/member_states/italy/country_report/4513/, Diakses pada 26 Februari 2015.

_____, 2008, *Relationship between the Public Prosecutor and the Minister of*

Justice, http://www.euro-justice.com/member_states/slovak_rep/country_report/2841/, Diakses pada 26 Februari 2015.

_____, 2010, *Hungary Public Prosecutor's Office*, http://www.euro-justice.com/member_states/hungary/country_report/2800/, Diakses pada 25 Januari 2015.

F.B. William Kelly, 2005, *An Independent Judiciary: The Core of the Rule of Law*, www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/An_Independant_Judiciary.pdf, Diakses pada 1 Desember 2014.

Hamilton, Alexander, 2005, *The Federalist*, <http://www.constitution.org/fed/federa78.htm>, Diakses pada 30 November 2014.

Hermawan, Ilham, 27 Mei 2008, "Memaknai Independensi Kejaksaan Di Indonesia (Kekuasaan Penuntutan)", <https://ilhamendra.wordpress.com/2008/05/27/kekuasaan-penuntutan/>, Diakses pada 20 Oktober 2014.

Hukum Online, 22 September 2010, Mahfud MD: Hendarman Supandji Harus Berhenti, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4c9a327ade2d2/hendarman-supandji-harus-berhenti>, Diakses pada 20 Februari 2015.

Hungary Public Prosecutor's Office, 10 November 2012, *Organization of Public Prosecutor of Republic Hungary*, <http://www.mklu.hu/cgi-bin/index.pl?lang=hu/>, Diakses pada 25 Januari 2015.

International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA), 9 Februari 2012, *Public Prosecutor Office*, http://www.iaaca.org/AntiCorruptionAuthorities/ByCountriesandRegions/I/Italyjigow/201202/t20120209_801648.shtml, Diakses pada 26 Februari 2015.

law.huji.ac.il/upload/InternationalStandardsJudicialInd2008.doc, Diakses pada 27
Februari 2015.

John Ferejhon, *“Dynamic of Judicial Independence: Independence Judges”*, *Dependent
Judiciary*. www.icclr.law.ubc.ca, Diakses pada 28 November 2014.

JORM, 2011, *“Public Prosecutor Office of Republic Macedonia”*
<http://www.jorm.org.mk/>, Diakses pada 24 Januari 2015.

Kejaksaan RI, *“Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia”*, www.kejaksaan.go.id,
http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3, Diakses pada 27
September 2014.

_____, Implementasi kekuasaan penuntutan di Negara hukum Indonesia,
[http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1
&id=54&bc=](http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=54&bc=), Diakses pada 27 September 2014.

_____, *“Doktrin Kejaksaan”*, www.kejaksaan.go.id/DoktrinKejaksaan.html/,
Diakses pada 27 September 2015.

Kompas, 13 Juni 2000, UU Kejaksaan Perlu Direvisi, [http://www.kompas.com/kompas-
cetak/0006/13/nasional/uuke08.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0006/13/nasional/uuke08.htm), Jakarta, Diakses pada 20 Februari 2015.

_____, 13 Desember 2011, *“Jaksa Agung Diusulkan Dipilih DPR”*,
www.kompas.com/JaksaAgungDiusulkanDipilihDPR-Kompas.com.htm/, Diakses
pada 20 Februari 2015.

Mahendra, Yusril Ihza, 2010, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung
Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*,
[http://yusril.ihzhamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-
agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-](http://yusril.ihzhamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-)

2014.

Majalah Prosekutor, 2014, “Posisi ideal Kejaksaan”, http://majalahprosekutor.com/index.php?option=com_content&view=article&id=153seminar-posisi-ideal-kejaksaan&catid=5:kabar-gedungbundar&Itemid=7, Diakses pada 28 Desember 2014.

Musriza, Riky, 2 November 2010, *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Konstitusi edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum, Volume III, Univeristas Bengkulu, hlm. 75-103, <http://ardilafiza.blogspot.com/2012/06/independensi-kejaksaan-sebagai.html>, Diakses pada 12 November 2014.

NGO, Februari 2012, *Opinion on the Acts of Parliament on Courts, Judges and the Prosecution Service in Hungary*, http://helsinki.hu/wpcontent/uploads/NGO_Analysis_on_New_Hungarian_Laws_Concerning_Courts_and_Prosecution_2012.pdf, Diakses pada 25 Januari 2015.

Prosecutor Office of Republic Italy, 23 Mei 2011, “*Organisation Prosecutor Office*”, http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_4_2_2.wp, Diakses pada 26 Februari 2015.

Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I, 2008, Studi tentang Implementasi Kekuasaan Penuntutan Di Negara Hukum Indonesia, Implementasi kekuasaan penuntutan di NegarahukumIndonesia, http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&id-su=35&idke=0&hal=1&id=54&bc=, Diakses pada 27 September 2014.

Quo Vadis Korps Adhyaksa, 2013, <http://muhammadismet.blogspot.com/2013/07/quo-vadis-korps-adhyaksa.html>, Diakses pada 28 Oktober 2014.

Roger K. Warren, 2005, “*The Importance of Judicial Independence and Accountability*”,

http://www.ncsconline.org/WC/Publications/KIS_JudIndSpeech_Script.pdf, Diakses
pada 1 Desember 2014.

Verde, Giovanni, 2004, “*Italian Judicial System*”,
www.csm.it/.../sistema%20giudiziario%20italiano/inglese.pdf, Diakses pada 26
Februari 2015.

Republika, 30 April 2012, “*Jaksa Agung Bukan Menteri*”,
[http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/04/30/m3a6y0-jimly-jaksa-
agung-bukan-menteri](http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/04/30/m3a6y0-jimly-jaksa-agung-bukan-menteri), Diakses pada 20 Februari 2015.

Rakyat Merdeka, 5 Juni 2007, “*Denny Indrayana : Hukum Kita Feodal*”,
[http://www.rakyatmerdeka.co.id/wan/hal/43/view/11/Denny-Indrayana:-Hukum-
Kita-Feodal](http://www.rakyatmerdeka.co.id/wan/hal/43/view/11/Denny-Indrayana:-Hukum-Kita-Feodal). Diakses pada 22 Februari 2015.

The European Statute of Justice, curia.europa.eu/jcms/jcms/P_91571/, Diakses pada 27
Februari 2015.

ThePanEuropeanConfrence, [www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccpe/conferences/default_en
.asp](http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccpe/conferences/default_en.asp), Diakses pada 27 Februari 2015.

Wikipedia, 21 Maret 2013 *Constitution of Bulgaria*,
en.wikipedia.org/wiki/Chief_Prosecutor_of_Hungary, Diakses pada 25 Februari
2015.

_____, 2 Januari 2015, *Constitution of Bulgaria*,
http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Bulgaria, Diakses pada 23 Februari
2015.

_____, 17 Januari 2015, “*Italy*”, <http://en.wikipedia.org/wiki/Italy#Government>,
Diakses pada 26 Februari 2015.

Diakses pada 26 Februari 2015.

Wiktionary, “Demisioner”, <http://id.wiktionary.org/wiki/demisioner>, Diakses pada 10
Januari 2015.

D. Peraturan Perundang-Undangan/ Dokumen Hukum Lain

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 (Keputusan Presiden RIS
tanggal 31 Januari 1950 Nomor 48, Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 3).

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 (Lembaran Negara RIS Tahun 1950
Nomor 56 dan Tambahan Lembaran Negara RIS No.37).

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (Berita Republik Indonesia (BRI) Tahun II
(Tahun 1946) Nomor 7)

Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4901)

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang- Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4401).



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor
15 Tahun 1961 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3451).

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 255, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 299).

Guidelines on the Role of Prosecutors Tahun 1990

The Universal Declaration of Human Right Tahun 1948

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Tahun 1966

Basic Principle on the Independence of the Judiciary Tahun 1985

Konstitusi Amerika Serikat

Konstitusi Thailand

Konstitusi Hungaria

Konstitusi Republik Makedonia

Konstitusi Bulgaria

Konstitusi Italia

Undang- Undang Kejaksaan Republik Makedonia Tahun 2004

Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman atau *Judicial Act* Italia



**Kedudukan Ideal untuk Mewujudkan Kemandirian Kelembagaan Kejaksaan dalam Sistem
Ketanegaraan
Indonesia**

DUSTIN CHENDHYKIAWAN , Andi Sandi Ant. T.T., S.H., LL.M.

Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-VIII/2010.